

RETRIBUSI-TARIF-KENDARAAN BERMOTOR

2018

PERWAL KOT.SMI NO.1, BD NO.1, LL SETDA KOT.SMI : 8 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

- ABSTRAK : - bahwa dengan semakin berkembangnya kendaran umum tidak dalam trayek yang berbasis online, maka sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Sukabumi untuk meringankan beban pengemudi dan pengusaha angkutan umum dalam trayek di Kota Sukabumi, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian perlu adanya peninjauan kembali tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2011.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009 UU No 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, Perda Kot.Smi No. 15 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 17 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif, tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2018.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Ketentuan selain mengenai tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

RETRIBUSI-TARIF-IZIN TRAYEK

2018

PERWAL KOT.SMI NO.2, BD NO.2, LL SETDA KOT.SMI : 6 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- ABSTRAK : - bahwa dengan semakin berkembangnya kendaraan umum tidak dalam trayek yang berbasis online dan dengan ditariknya sebagian urusan pemerintahan bidang perhubungan ke daerah provinsi, maka perlu adanya peninjauan kembali tarif retribusi izin trayek yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2011.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No 33 Tahun 2004, UU No, 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, Perda Kot.Smi No. 13 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Retribusi Izin Trayek yang ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif, tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini. Meliputi: Tarif Retribusi Izin Trayek dan Tarif Pengawasan Izin Trayek.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2018.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka ketentuan selain mengenai tarif izin trayek yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.

STANDAR SATUAN HARGA- APBD
2018

PERWAL KOT.SMI NO. 4, BD NO. 1, LL SETDA KOT.SMI : 17 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK : - bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan desk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, survey pendahuluan audit oleh Inspektorat Kota Sukabumi, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tenaga kerja, dan kegiatan keagamaan di Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang datur dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perda Kot. SMI No. 1 Tahun 2007, Perda Kot. SMI No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Belanja Pegawai, Standar Satuan Tertinggi Belanja Barang/Jasa.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2018.
- Ketentuan lampiran Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 16), yakni angka I Standar Satuan Tertinggi Belanja Pegawai pada Nomor 20, nomor 40, dan nomor 79 diubah dan ditambah nomor 139 serta angka II Standar Satuan Harga Tertinggi Belanja Barang dan Jasa huruf C nomor 7, nomor 34, dan nomor 41, dan huruf f nomor 6 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

RETRIBUSI-TARIF-TERMINAL

2018

PERWAL KOT.SMI NO.3, BD NO.3, LL SETDA KOT.SMI : 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TARIF RETRIBUSI TERMINAL

- ABSTRAK : - bahwa dengan semakin berkembangnya kendaraan umum tidak dalam trayek yang berbasis online, maka sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Sukabumi untuk meringankan beban pengemudi dan pengusaha angkutan umum dalam trayek di Kota Sukabumi, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, perlu adanya peninjauan kembali tarif retribusi terminal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2011.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No 33 Tahun 2004, UU No, 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, Perda Kot.Smi No. 13 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Retribusi Terminal yang ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif, tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2018.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka ketentuan selain mengenai tarif izin trayek yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.

RETRIBUSI - PERPANJANGAN IZIN - TENAGA KERJA ASING

2018

PERWAL KOT.SMI NO.6, BD NO.6, LL SETDA KOT.SMI : 16 HLM

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU 13 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 31 Tahun 1994, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 97 Tahun 2012, Perda Kot. SMI No. 9 Tahun 2016, Perda Kot. SMI No. 3 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Prinsip Dan Sasaran Perpanjangan IMTA, Persyaratan Perpanjangan IMTA, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Dan/Atau Dokumen Lain Dipersamakan, Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Retribusi, Jatuh Tempo Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Retribusi, Penerbitan IMTA, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2018.
- IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya Retribusi dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

TARIF-PERUSAHAAN DAERAH-AIR MINUM

2018

PERWAL KOT.SMI NO.7, BD NO. 7, LL SETDA KOT.SMI : 8 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.7 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 16 Tahun 2005, PP No. 122 Tahun 2015, Perda Kot.Smi No. 3 Tahun 2009, Perda Kot.Smi No.5 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang dibedakan ke dalam: tarif rendah, tarif dasar, tarif penuh, dan tarif kesepakatan, dengan cara penghitungan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2018.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
 1. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Harga Jual Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 2. Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi selain yang diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Untuk penetapan tarif kesepakatan, Wali Kota Sukabumi mendelegasikan kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.

LAHAN PERTANIAN-SISTEM INFORMASI

2018

PERWAL KOT.SMI NO.8, BD NO. 8, LL SETDA KOT.SMI : 17 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 41 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 25 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyediaan Data Pertanian Pangan Berkelanjutan, Penyelenggaraan Sistem Informasi, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2018.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka: Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan mempublikasikan produk Informasi dan Sistem Informasi LP2B kepada para Pemangku Kepentingan secara berkala dan berkelanjutan.

LAHAN PERTANIAN-PENETAPAN-ALIH FUNGSI
PERWAL KOT.SMI NO.9, BD NO. 9, LL SETDA KOT.SMI : 23 HLM
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 41 Tahun 2009, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 25 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2016, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan LP2B, Alih Fungsi LP2B dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2018.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
 1. dalam memberikan persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan Wali Kota Sukabumi dibantu oleh tim verifikasi yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
 2. dalam memberikan taksiran ganti rugi lahan yang dialih fungsikan dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian yang dibentuk oleh Wali Kota.

LAHAN PERTANIAN-INSENTIF PERLINDUNGAN
2018

PERWAL KOT.SMI NO.10, BD NO. 10, LL SETDA KOT.SMI : 23 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 41 Tahun 2009, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 12 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2016, Perda Kot.Smi No. 10 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Jenis, Pertimbangan, dan Tata Cara Pemberian Insentif Pencabutan Insentif, Dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2018.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah dan Kepala Dinas perangkat daerah yang bersangkutan.

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN - KEPESERTAAN
2018

PERWAL KOT.SMI NO.11, BD NO. 11, LL SETDA KOT.SMI : 8 HLM

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya perlindungan terhadap pemberi kerja dan pekerja, perlu adanya pengaturan mengenai peningkatan kepesertaan program dimaksud di Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 41 Tahun 2009, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 12 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2016, Perda Kot.Smi No. 10 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Jenis, Pertimbangan, dan Tata Cara Pemberian Insentif Pencabutan Insentif, Dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2018.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah dan Kepala Dinas perangkat daerah yang bersangkutan.

FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA - JADWAL
RETENSI ARSIP
2018

PERWAL KOT.SMI NO.12, BD NO. 12, LL SETDA KOT.SMI : 43 HLM

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN APARATUR
SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA, DAN PEJABATA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan dan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, dan Pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Keprea No. 105 Tahun 2004, Perda Kot. SMI No. 6 Tahun 2015, Perda Kot. SMI No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jadwal Retensi Arsip, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2018.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah dan Kepala Dinas perangkat daerah yang bersangkutan.

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 - INDIKATOR KINERJA UTAMA
2018

PERWAL KOT.SMI NO.13, BD NO. 13, LL SETDA KOT.SMI : 9 HLM

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 dan belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023, maka untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, dalam menentukan target kinerja utama sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2019 dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP. No. 3 Tahun 1995, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP. No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 6 Tahun 2008, PERDA KOT. SMI. No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI. No. 7 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI. No. 6 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI.No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2019.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Mei 2018.

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT-PEDOMAN PENYUSUNAN
2018

PERWAL KOT.SMI NO.14, BD NO. 14, LL SETDA KOT.SMI : 33 HLM

PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : - Bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 96 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 9 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang latar belakang masalah, tujuan survey kepuasan masyarakat, metode, tim Survey Kepuasan Masyarakat dan jadwal pelaksanaan dan tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juli 2018.

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 - RENCANA KERJA
2018

PERWAL KOT.SMI NO.15, BD NO. 15, LL SETDA KOT.SMI : 8 HLM

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang latar belakang masalah, tujuan survey kepuasan masyarakat, metode, tim Survey Kepuasan Masyarakat dan jadwal pelaksanaan dan tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juli 2018.

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 - RENCANA KERJA
2018

PERWAL KOT.SMI NO.16, BD NO. 16, LL SETDA KOT.SMI : 21 HLM

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan, serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 96 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- CATATAN
- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juli 2018.

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 - RENCANA KERJA
2018

PERWAL KOT.SMI NO.17, BD NO. 17, LL SETDA KOT.SMI : 23 HLM

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 96 Tahun 2012, Perpres RI No. 81 Tahun 2010, Perda Kot. SMI No. 9 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi pelayanan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juli 2018.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 - RENCANA KERJA
2018

PERWAL KOT.SMI NO.19, BD NO. 19, LL SETDA KOT.SMI : 8 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya asumsi yang tidak sesuai dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, uu No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2008, Perda Kot. SMI No. 1 Tahun 2007, Perda Kot. SMI No. 7 Tahun 2008, Perda Kot.SMI No. 6 Tahun 2010, Perda Kot.SMI No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi .

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Juli 2018.

KEWENANGAN - PELAYANAN PERIZINAN

2018

PERWAL KOT.SMI NO.20, BD NO. 20, LL SETDA KOT.SMI : 14 HLM

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal daerah serta menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 2 Tahun 2018, Perpres No. 97 Tahun 2014, Perda Kot.Smi No. 6 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 17 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 18 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 19 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2018.

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH - APBD

2018

PERWAL KOT.SMI NO.21, BD NO. 21, LL SETDA KOT.SMI : 42 HLM

PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUKABUMI JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, menekan angka putus sekolah, dan menuntaskan wajib belajar pendidikan 12 (duabelas) Tahun, Pemerintah Kota Sukabumi memberikan Dana Bantuan Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Sukabumi.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No. 6 Tahun 2014, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pengelolaan Dana, Pelaksanaan Program, Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Penutup.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2018.

INFORMASI HUKUM - JARINGAN DOKUMENTASI

2018

PERWAL KOT.SMI NO.22, BD NO. 22, LL SETDA KOT.SMI : 11 HLM

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah diakses, tepat, dan cepat, perlu dilaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, Perpres No. 33 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tujuan JDIH, Organisasi JDIH di Daerah.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2018.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 13 Seri E - 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENGARUSUTAMAAN - GENDER

2018

PERWAL KOT.SMI NO.24, BD NO. 24, LL SETDA KOT.SMI : 15 HLM

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : - bahwa kesetaraan gender dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender, perlu diimplementasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Sukabumi.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Perencanaan Dan Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2018.

PERILAKU PEGAWAI - KODE ETIK

2018

PERWAL KOT.SMI NO.25, BD NO. 25, LL SETDA KOT.SMI : 16 HLM

KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : - bahwa sesuai Pasal 3 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, aparatur sipil negara merupakan suatu profesi yang berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 7 Tahun 1977, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 11 Tahun 2017, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai, Tujuan Kode Etik, Etika dalam organisasi, Etika dalam masyarakat, Etika terhadap sesama pegawai.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2018.

INVENTARISASI - BMD

2018

PERWAL KOT.SMI NO.26, BD NO. 26, LL SETDA KOT.SMI : 28 HLM

PEDOMAN PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2012, PP No. 40 Tahun 1994, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 17 Tahun 2017, Perda Kot. Smi 9 Tahun 2016..
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Inventarisasi BMD meliputi tanah dan/atau bangunan yang dikelola dan dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Sukabumi sampai dengan Tahun Anggaran..
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 2018.

INVENTARISASI - BMD
2018

PERWAL KOT.SMI NO.27, BD NO. 29, LL SETDA KOT.SMI : 11 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK : - bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, kegiatan lomba cerdas cermat HAM, kegiatan lomba kadarkum, dan kegiatan sosialisasi Ranham, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2018 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang datur dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 16 Tahun 2018, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Belanja Pegawai, Standar Satuan Tertinggi Belanja Barang/Jasa, Belanja Makanan Dan Minuman.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 2018.

STRATEGI PENGELOLAAN - SAMPAH RUMAH TANGGA
2018

PERWAL KOT.SMI NO.29, BD NO. 31, LL SETDA KOT.SMI : 30 HLM

KEIBAJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA
SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kebijakan dan Strategi Kota Sukabumi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 81 Tahun 2012, Perpres No. 97 Tahun 2017, Perda Kot.Smi No. 17 Tahun 2011, Perda Kot.Smi 9 Tahun 2016, Perda Kot.Smi No. 13 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jakstrada Pendanaan, Ketentuan Penutu.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Oktober 2018.

KECAMATAN BAROS - WILAYAH ADMINISTRASI

2018

PERWAL KOT.SMI NO.32, BD NO. 34, LL SETDA KOT.SMI : 30 HLM

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BAROS KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib administrasi pada Kecamatan Baros Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Kecamatan Cibereum, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Warudoyong, maka perlu menerbitkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 10 Tahun 2000, PP No. 17 Tahun 2018, Perda Kot. SMI No. 15 Tahun 2000, Perda Kot.SMI No. 11 Tahun 2012, Perda Kot. SMI No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pilar Acuan Batas Utama Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Oktober 2018.

RETENSI ARSIP - NON KEUANGAN- NON KEPEGAWAIAN
2018

PERWAL KOT.SMI NO.33, BD NO. 34, LL SETDA KOT.SMI : 14 HLM

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN
SERTA SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu diterbitkan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta Substansif di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Perda Kot. Smi No. 5 Tahun 2015, Perda Kot.Smi No. 6 Tahun 2015, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jadwal Retensi Arsip, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Oktober 2018.

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI - UPAH
2018

PERWAL KOT.SMI NO.34, BD NO. 36, LL SETDA KOT.SMI : 12 HLM

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN UPAH BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi pegawai sekaligus evaluasi terhadap kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi PNS dan THL di lingkungan Pemerintah Daerah, Ketentuan jam kerja.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Oktober 2018.

PEMBAYARAN - PELAPORAN

2018

PERWAL KOT.SMI NO.37, BD NO. 37, LL SETDA KOT.SMI : 12 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*

- ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan pemungutan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, perlu adanya perekaman usaha yang dilaksanakan oleh wajib pajak secara elektronik.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2016, Perda Kot.Smi. No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2011, Perda Kot. Smi No. 7 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 8 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2011, Perda Kota Smi No. 10 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 11 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 17 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016..
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak secara *online*, perekaman transaksi usaha secara elektronik.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 November 2018.

PEDOMAN TINDAK LANJUT - BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
2018

PERWAL KOT.SMI NO.38, BD NO. 40, LL SETDA KOT.SMI : 15 HLM

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2006, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2017, Perda Kot.Smi, No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang pendahuluan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan/monitoring TLHP, Evaluasi, Penatausahaan dan Pelaporan, Rapat koordinasi hasil pemantauan TLHP dan penutup.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 November 2018.

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI - PERUBAHAN
2018

PERWAL KOT.SMI NO.42, BD NO. 44, LL SETDA KOT.SMI : 6 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN UPAH BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Upah bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Perubahan Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Dan Upah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Desember 2018.
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut terhitung mulai bulan Nopember 2018.

KECAMATAN GUNUNGPUYUH - BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
2018

PERWAL KOT.SMI NO.43, BD NO. 45, LL SETDA KOT.SMI : 11 HLM

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN GUNUNGPUYUH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib administrasi pada Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Kecamatan Warudoyong, dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, serta dengan Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, maka perlu menerbitkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 10 Tahun 2000, PP No. 17 Tahun 2018, Perda.Kot. SMI No. 15 Tahun 2000, Perda Kot.SMI No. 11 Tahun 2012, Perda Kot.SMI No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Desember 2018.

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI - KEBIJAKAN

2018

PERWAL KOT.SMI NO.51, BD NO. 53, LL SETDA KOT.SMI : 11 HLM

KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi perlu adanya pengaturan tunjangan kinerja yang adil dan layak sesuai dengan bobot pekerjaan dan tanggung jawab serta indeks kemahalan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No, 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2017, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Prinsip Penetapan

Tunjangan Kinerja, Faktor-faktor Tunjangan Kinerja.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2018.

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI - MEKANISME 2018

PERWAL KOT.SMI NO.52, BD NO. 54, LL SETDA KOT.SMI : 25 HLM

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan adanya perubahan mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Upah Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No, 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2017, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria

Penerima TPP, Sistem Informasi Administrasi Presensi Pegawai, Kinerja, Perhitungan TPP, Tata Cara Pembayaran TPP, Ketentuan Lian-Lain, Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2018.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Upah Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Upah Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.